

BAB I

PENDAHULUAN

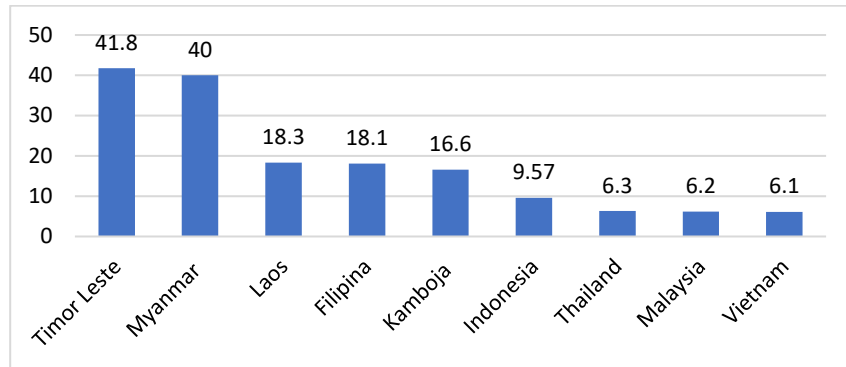
1.1 Latar Belakang Penelitian

Terlepas dari upaya pembuat kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, kemiskinan tetap menjadi salah satu masalah paling menantang di dunia. (Goh et al., 2024). Kemiskinan mengindikasikan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Ini adalah persoalan yang rumit yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia. (Machmud, 2016)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati salah satu upaya besar untuk mengatasi kemiskinan global melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diumumkan pada tahun 2015 dan digunakan sebagai tujuan pembangunan bersama hingga tahun 2030 (Arifin, 2020). Kesepakatan tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan bersama yang bersifat universal, dengan menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam menjaga keseimbangan ketiga dimensi tersebut, SDGs didasarkan pada lima pilar utama, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. SDGs menargetkan tiga pencapaian utama pada tahun 2030, yaitu mengakhiri kemiskinan, mewujudkan kesetaraan, dan menangani perubahan iklim, dengan kemiskinan tetap menjadi isu sentral selain dua tujuan lainnya. Untuk mencapai ketiga sasaran tersebut, telah dirancang 17 Tujuan Global, salah satunya adalah menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia. (Ishartono & Raharjo, 2016).

Menurut data dari United Nations Development Programme (2024), di 112 negara, 1,1 miliar orang dari 6,3 miliar hidup dalam kemiskinan. Hampir setengah (48,2 persen) dari orang-orang miskin ini tinggal di Afrika Sub-Sahara (553 juta), dan lebih dari sepertiga (35,0 persen) tinggal di Asia Selatan (402 juta). Jadi, 83,2 persen orang miskin tinggal di dua wilayah ini, sementara 9,1 persen tinggal di Asia Timur dan Pasifik (104 juta), 4,6 persen di Negara-negara Arab (53 juta), 3,0 persen di Amerika Latin dan Karibia (34 juta) dan 0,2 persen di Eropa dan Asia Tengah (2 juta).

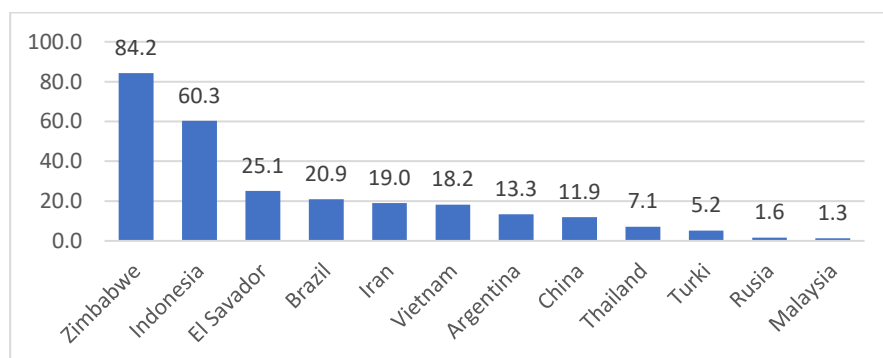
Dalam konteks negara ASEAN, Menurut Laporan ASEAN Secretariat dalam *ASEAN Key Figures* tepat pda tahun 2022, jumlah penduduk miskin yang ada pada negara Indonesia berjumlah 9,57%, ditahun yang sama pada Malaysia sebesar 6,2% lalu pada negara Thailand 6,3% dan negara Vietnam sebesar 6,1%.



Gambar 1.1 Tingkat ASEAN pada Tahun 2022

Sumber: DataIndonesia.id

Bank Dunia melalui *Macro Poverty Outlook (2025)* memberikan perspektif berbeda dengan menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar US\$6,85 PPP per hari. Dengan ukuran ini, Indonesia tercatat memiliki lebih dari 171,8 juta jiwa atau sekitar 60,3% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding garis kemiskinan nasional versi BPS pada 2024, yang mencatat hanya 24,06 juta orang atau 8,57% dari total penduduk. Perbedaan ini menegaskan bahwa hasil pengukuran tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh standar yang digunakan, baik internasional maupun nasional.



Gambar 1. 2 Urutan Negara dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak

Sumber: World Bank (2025)

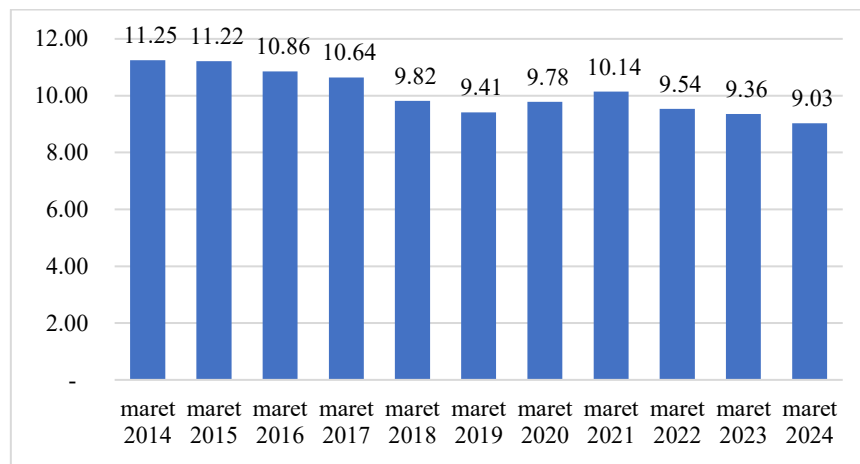
Kemiskinan tetap menjadi persoalan besar bagi Indonesia. Walaupun secara angka persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan, jumlah absolut

Widia Sri Astuti, 2025

ANALISIS PENYALURAN DANA ZIS, INVESTASI ASING LANGSUNG, INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penduduk miskin di Indonesia masih terbilang sangat tinggi (Ishartono & Raharjo, 2016). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditetapkan target penurunan kemiskinan sebesar 6,5-7,5%. Namun, hingga saat ini, target tersebut belum tercapai karena masih terdapat selisih sekitar 2-3%. Melihat tren dari tahun-tahun sebelumnya, penurunan kemiskinan hanya berkisar antara 0,3-0,5%. Sementara itu, kemiskinan ekstrem mengalami penurunan sebesar 0,90% pada periode 2022-2023, dengan angka kemiskinan ekstrem saat ini tercatat sebesar 1,12% (Prodi PKP Pascasarjana UGM, 2024)



Gambar 1. 3 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan gambar 1.3 persentase penduduk miskin Indonesia dari tahun 2014-2019 cenderung menurun (BPS, 2019). Pada tahun 2020-2021, persentase penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda (Arifin, 2020).

Meskipun secara nasional persentase kemiskinan menunjukkan tren menurun dan berbagai program pengentasan telah dijalankan oleh pemerintah, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persoalan ini belum terselesaikan secara tuntas. Pada tahun 2025, masih banyak provinsi di Indonesia yang mencatat angka kemiskinan cukup tinggi, dengan mayoritas berada di atas 7%. Bahkan, Papua Pegunungan mencatat angka kemiskinan tertinggi sebesar 30,03%, disusul oleh Papua Tengah (28,9%), Papua Barat (20,66%), dan Papua Selatan (19,71%) (Badan Pusat Statistik, 2025).

Widia Sri Astuti, 2025

ANALISIS PENYALURAN DANA ZIS, INVESTASI ASING LANGSUNG, INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Di sisi lain, beberapa provinsi di Indonesia bagian barat seperti Bali (3,72%), Kalimantan Selatan (3,84%), dan DKI Jakarta (4,28%) memiliki angka kemiskinan yang sangat rendah (Badan Pusat Statistik, 2025). Fenomena ini memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah individu atau rumah tangga, melainkan juga masalah daerah yang memerlukan pendekatan spesifik di tingkat provinsi. Banyak wilayah yang menghadapi tantangan struktural dalam hal pembangunan infrastruktur, rendahnya produktivitas ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar (Putra & Suharto, 2024).

Tingginya angka kemiskinan di berbagai provinsi ini menjadi sinyal nyata bahwa upaya penanggulangan kemiskinan perlu dipertajam. Masalah ini tidak bisa dianggap selesai hanya karena angka nasional menurun. Sebaliknya, fakta bahwa di tahun 2025 masih terdapat lebih dari 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas 7% menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi tantangan pembangunan yang sangat nyata dan relevan untuk diteliti (Putra & Suharto, 2024)

Berdasarkan teori kemiskinan Ibnu Khaldun, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Menurutnya, kemiskinan mencakup dimensi moral, intelektual, sosial, demografi, dan politik. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya berfokus pada perbaikan sektor ekonomi, melainkan harus dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan berbagai sektor lainnya (Sirajul Huda, 2024)

Kemiskinan dapat diatasi melalui penyaluran dana ZIS juga berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Dalam perspektif Islam, kemiskinan dan zakat memiliki kaitan yang erat, di mana zakat menjadi salah satu cara efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan (Miftahussalam & Rofiuddin, 2021). Berdasarkan Puskas BAZNAS, zakat mempunyai peran penting di tengah pandemi Covid-19, misalnya di sektor ekonomi zakat berperan dalam pemberdayaan mustahik. Zakat juga berperan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menyerahkan bantuan alat medis, menyediakan ruang isolasi, memberO9.Likan disinfektan di berbagai daerah, dan melakukan pemasangan tempat cuci tangan di daerah yang rawan terhadap penyebaran Covid-19. Selain itu, dana zakat dapat disalurkan untuk membantu masyarakat dan UMKM yang rentan terdampak pandemi. Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia dengan

potensi zakat yang juga besar, tetapi belum didukung oleh kenyataan pengumpulan zakat (Nurjanah et al., 2019). Zakat di Indonesia masih belum terdistribusi secara merata, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat (Yuliasih et al., 2021).

Indonesia memiliki potensi zakat yang besar namun tidak dalam realisasi zakatnya, meskipun dana zakat yang diterima pada tiap tahunnya meningkat namun jumlahnya tidak mencapai potensi yang sudah diperkirakan sebelumnya. Pendistribusian zakat di Indonesia pada tiap tahunnya meningkat namun belum tentu dana zakat didistribusikan secara merata kepada mustahik (Yuliasih et al., 2021).

Pada tahun 2023, Indonesia mempunyai potensi pengumpulan zakat senilai 327,6 triliun rupiah (Puskas BAZNAS, 2024). Namun, potensi tersebut belum mampu diikuti oleh realisasi yang sesuai dikarenakan masih terdapat gap pengumpulan yang cukup besar, di mana dana yang terkumpul hanya mencapai 32 triliun rupiah atau sekitar 10% dari total potensi zakat yang ada (Baznas, 2023).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan potensi zakat di Indonesia masih kurang sehingga potensi yang besar belum dapat dioptimalkan. Padahal apabila potensi zakat di Indonesia dapat direalisasikan dengan baik dan mencapai hampir 100% tentunya akan sangat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, optimalisasi zakat saja tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan secara menyeluruh. Diperlukan dukungan kebijakan dan peran aktif negara dalam menjaga pemerataan ekonomi dan distribusi kekayaan. Adapun berkaitan dengan peran negara, hal tersebut dapat dilakukan melalui tata kelola kepemilikan umum dan negara (Juliana et al., 2018). Menurut Nadzari et al. (2012) dalam (Arif, 2017), apabila zakat dikelola dengan baik mampu membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, menurut data yang dipublikasikan oleh Puskas BAZNAS (2022), zakat berdampak besar terhadap upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dan terbukti dari tingginya jumlah penerima zakat yang keluar dari garis kemiskinan, yaitu sekitar 313.922 jiwa. Dapat dibayangkan apabila dana zakat menjadi fokus utama perekonomian negara dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu, berbagai sektor menjadi cakupan target pendistribusian dana zakat, bahkan terdapat bagian yang dikhususkan kepada

program kemanusiaan. Hal ini membuktikan bahwa zakat adalah amal perbuatan untuk memperoleh kebaikan yang sesungguhnya (Jaenudin & Hamdan, 2022)

Menurut Salvatore (2007) tentang investasi, terutama investasi langsung, merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberantasan kemiskinan. investasi asing langsung terjadi ketika investor asing menanamkan modalnya dalam bentuk aset riil seperti tanah, bangunan, peralatan, dan teknologi di suatu negara. Keberadaan investasi asing langsung di suatu negara dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme. Namun, untuk mendukung manfaat positif investasi asing langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan lingkungan yang kondusif dan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Kebijakan pro-investasi asing langsung dan infrastruktur yang memadai dapat menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Namun, meskipun arus masuk investasi asing langsung telah meningkat tiga kali lipat di Indonesia sejak tahun 1996 (dari US\$ 6,19 miliar pada tahun 1996 menjadi US\$ 20,08 miliar pada tahun 2021), kemiskinan tetap tinggi, menantang gagasan empiris bahwa investasi asing langsung memitigasi kemiskinan (Magombeyi & Odhiambo, 2018).

Menurut Erlando et al. (2020) menyatakan jika pendidikan mudah diakses oleh masyarakat, hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan mereka. Kemiskinan dalam keluarga juga erat kaitannya dengan inklusi keuangan, yang mengacu pada akses dan penggunaan produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan transfer dana. Melalui inklusi keuangan, masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan (Jaenudin & Hamdan, 2022)

Manajemen keuangan yang efisien dan efektif memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kemiskinan, inklusi keuangan dapat berperan dalam membantu individu keluar dari lingkaran kemiskinan melalui penciptaan peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan aksesibilitas untuk memperoleh pendapatan yang memadai (Safitri & Susilo, 2024).

Di sisi lain, hal yang berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kemiskinan di Indonesia adalah tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia bukan hanya angka statistik yang berubah tiap tahun, melainkan cermin rapuhnya sistem ekonomi dalam menyediakan pekerjaan layak bagi masyarakatnya. Dalam rentang waktu 2019 hingga 2023, meskipun Indonesia perlahan pulih dari dampak pandemi COVID-19, masalah pengangguran masih menjadi ancaman nyata yang secara langsung memperparah kemiskinan di berbagai wilayah (Nurhalim et al., 2022)

Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa seperti Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta konsisten mencatat TPT tertinggi secara nasional. Pada puncak pandemi tahun 2020, DKI Jakarta mencapai angka pengangguran hingga 10,95%, dan meskipun terjadi penurunan di tahun-tahun berikutnya, angka ini masih menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja belum mampu mengejar laju pertumbuhan penduduk usia kerja. Di sisi lain, provinsi-provinsi di Indonesia timur seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua memang mencatat TPT lebih rendah, tetapi ini tidak menandakan kondisi yang lebih baik. Rendahnya angka tersebut lebih mencerminkan dominasi sektor informal dan rendahnya pencatatan kerja formal, bukan karena mereka terbebas dari pengangguran.

Permasalahannya menjadi semakin serius ketika dikaitkan dengan kemiskinan. Tingginya TPT di wilayah padat seperti Jawa berdampak langsung pada meningkatnya jumlah rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan, karena tidak adanya pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebaliknya, di wilayah timur, meskipun TPT rendah secara statistik, tingginya proporsi penduduk yang bekerja di sektor informal dan berupah rendah tetap menjebak mereka dalam kemiskinan struktural yang sulit keluar dari lingkaran setan kemiskinan (Rivana & Gani, 2024)

Kemiskinan tetap menjadi isu global yang mendesak, dengan sekitar 719 juta orang di dunia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem sebesar US\$2,15 per hari (PPP 2017) menurut standar World Bank (2023). Krisis seperti pandemi Covid-19, yang menambah 88–115 juta orang miskin, serta kenaikan harga pangan global semakin memperburuk tantangan ini. Indonesia juga menghadapi persoalan serupa.

Meskipun tingkat kemiskinan nasional berhasil menurun hingga 8,57% atau setara dengan 24,06 juta orang pada September 2024 (BPS, 2024), sekitar 59% penduduk Indonesia masih hidup dengan pengeluaran di bawah US\$6,85 per hari (PPP 2017), yaitu garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah-atas menurut World Bank. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan antarwilayah dan belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi syariah, khususnya zakat, sebagai instrumen pemberdayaan. Dengan tenggat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goal 1 pada tahun 2030, penelitian ini mendesak untuk mengkaji solusi berbasis syariah dan tata kelola guna mempercepat pengentasan kemiskinan.

Penelitian terdahulu sering berfokus pada variabel konvensional seperti pendapatan atau infrastruktur. Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis pengaruh penyaluran dana ZIS, inklusi keuangan syariah, investasi asing langsung, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Kombinasi variabel syariah (penyaluran dana ZIS, inklusi keuangan syariah yang hanya menjangkau 12,7% populasi dengan variabel struktural (investasi asing langsung) belum banyak dieksplorasi.

Berdasarkan pada fenomena empiris yang telah diuraikan serta hasil kajian dari penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan hasil, sehingga diperlukan adanya penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penyaluran Dana ZIS, Investasi Asing Langsung, Inklusi Keuangan Syariah, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Kemiskinan merupakan persoalan yang sampai saat ini masih belum mampu diatasi baik oleh negara berkembang maupun maju. Berbagai upaya telah dilakukan dari tahun ke tahun untuk mengatasi persoalan ini, namun hal tersebut masih belum mampu untuk mengatasi kemiskinan dengan tuntas (Arifin 2020).

2. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditetapkan target pengurangan angka kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5%. Namun, target tersebut belum tercapai karena terdapat selisih sekitar 2-3%. Berdasarkan tren dari tahun-tahun sebelumnya, laju penurunan kemiskinan hanya sekitar 0,3-0,5% per tahun.
3. Berdasarkan laporan World Bank, Indonesia menempati urutan kedua Negara dengan penduduk miskin terbanyak di dunia
4. Meski menurun, angka kemiskinan di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand (World Bank, 2020). Indonesia menampung lebih dari 80% populasi miskin ASEAN, yang berjumlah 36 juta pada tahun 2018, menurut Asean Development Bank (2018).
5. Arus masuk investasi asing langsung telah meningkat tiga kali lipat di Indonesia sejak tahun 1996 (dari US\$ 6,19 miliar pada tahun 1996 menjadi US\$ 20,08 miliar pada tahun 2021), kemiskinan tetap tinggi, menantang gagasan empiris bahwa investasi asing langsung memitigasi kemiskinan (Magombeyi dan Odhiambo, 2018; Ahmad dkk., 2019; Gnanngnon, 2022).
6. Pada tahun 2023, Indonesia mempunyai potensi pengumpulan zakat senilai 327,6 triliun rupiah (Puskas BAZNAS, 2024). Namun, potensi tersebut belum mampu diikuti oleh realisasi yang sesuai dikarenakan masih terdapat gap pengumpulan yang cukup besar, di mana dana yang terkumpul hanya mencapai 32 triliun rupiah atau sekitar 10% dari total potensi zakat yang ada (Puskas BAZNAS 2022).
7. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Angka ini meningkat sekitar 83 ribu orang atau 1,11 persen dibanding Februari 2024

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat Penyaluran Dana ZIS, Investasi asing langsung, Inklusi keuangan syariah, dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Penyaluran Dana ZIS terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

Widia Sri Astuti, 2025

ANALISIS PENYALURAN DANA ZIS, INVESTASI ASING LANGSUNG, INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Bagaimana pengaruh investasi asing langsung terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengidentifikasi masalah kemiskinan di Indonesia dan juga mengetahui bagaimana pengaruh variabel penyaluran dana ZIS, investasi asing langsung, inklusi keuangan syariah, dan tingkat pengangguran terbuka berdampak terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain itu, dengan jelasnya tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi berupa manfaat ilmu pengetahuan dan *transfer knowledge* terhadap perkembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam khususnya pada bidang kesejahteraan masyarakat. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada permasalahan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan atau referensi dalam pengambilan keputusan mengenai upaya pengurangan tingkat kemiskinan dan peningkatan pembangunan manusia supaya dapat menjadi upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Bagi lembaga pengelola zakat, dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam pengambilan keputusan mengenai peningkatan realisasi potensi dana zakat supaya lebih maksimal. Bagi akademisi, dapat menjadi informasi bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai peningkatan kualitas dan mutu sumber daya manusia di daerah dengan mayoritas penduduknya muslim.